

**ANALISIS PROGRAM BBM 1 HARGA
PT PERTAMINA (PERSERO) DI KABUPATEN NIAS SELATAN**

T E S I S

O L E H

**RINI KARTIKA MAYA SARI
NPM. 181801008**



**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)21/8/23

ABSTRAK

Analisis Program BBM 1 Harga PT Pertamina (Persero) di Kabupaten Nias Selatan

N a m a : Rini Kartika MS
N I M : 181801008
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Pembimbing I : Prof. Dr. R. Hamdani Harahap, M.Si
Pembimbing II : Dr. Warjio, MA

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang berada di wilayah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T), pemerintah mengeluarkan Program BBM 1 Harga. Sebelum adanya program BBM 1 Harga, BBM yang dijual pada wilayah 3T bervariasi mulai dari Rp.10.000/liter sampai dengan Rp.15.000/liter. Program ini merupakan penugasan langsung dari Pemerintah ke BPH Migas, untuk selanjutnya dilaksanakan oleh BUMN PT Pertamina MOR I. Kabupaten Nias Selatan merupakan salah satu target Program BBM 1 Harga pada tahun 2017. Sebanyak 4 (empat) SPBU telah beroperasi untuk menyalurkan BBM Premium dan Solar kepada masyarakat yang berada di Kecamatan Lahusa, Lolowa'u, Pulau-pulau Batu Tello dan Kecamatan Hibala. Program ini disambut sangat baik oleh masyarakat setempat, dimana selama ini masyarakat belum merasakan dampak dari pemberlakuan subsidi pemerintah. Namun, tentu saja pemberlakuan Program ini memiliki tantangan, peluang dan kelemahan.

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, *focused*

group discussion serta dokumentasi. Analisis data yang dilakukan dengan pengumpulan data, analisis data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan analisis berdasarkan *Strengths, Weaknesses, Opportunities dan Threats*.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Program BBM 1 Harga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selain itu program ini tidak akan menjadi beban bagi APBN karena murni dilaksanakan oleh PT Pertamina (Persero). Namun, dibalik itu terdapat kelemahan dalam Program BBM 1 Harga diantaranya adalah belum didukung oleh sarana dan fasilitas lainnya seperti ketersediaan listrik dan jalur transportasi yang kurang bagus. Program ini bisa memberikan peluang bagus bagi Pertamina untuk membuka kios-kios LPG atau produk lainnya bagi Pertamina. Sementara tantangan program ini adalah pengecer yang masih beroperasi yang memungkinkan masyarakat yang berada jauh dari SPBU program tersebut belum merasakan secara menyeluruh harga Premium Rp. 6.500,- dan Solar Rp.5.500,-.

Diharapkan kedepannya dalam hal pemerataan pembangunan diwilayah 3T. Pemerintah tidak hanya melihat dari ketersediaan BBM, tetapi juga perihal keersediaan sarana dan fasilitas yang memadai seperti ketersediaanm air bersih, listrik, jalur transportasi, armada transportasi, pelayanan kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya.

Kata Kunci ; *Analisis Kebijakan, Metode SWOT, Program BBM 1 Harga.*

ABSTRACT

Program Analysis “BBM 1 Harga” PT Pertamina (Persero) at South Nias Regency

Name : Rini Kartika MS
Student Identity Number : 181801008
Program Study : Master Of Public Administration
Mentor I : Prof. Dr. R. Hamdani Harahap, M.Si
Mentor II : Dr. Warjio, MA

To meet the amount of fuel that needs by the people who are living in the “3T” (Tertinggal, Terluar dan Terdepan) areas, the government issues “Program BBM 1 Harga”. Before this program launched by the government, fuels price was higher than the official price. The illegal retailer sold it from 10.000 to 15.000 Rupiah per litre. This program is a direct assignment from the Government to BPH Migas, to be subsequently carried out by BUMN PT Pertamina Marketing Operation Region in all units in Indonesia. South Nias Regency is one of the targets of the program in 2017. Four gas stations have been operating to distribute Benzene (Premium) and Diesel (Solar) called “Bahan Bakar Minyak (BBM) to the people of Lahusa, Lolowa'u, Tello Islands and Hibala District. This program has been very well received by the local community, so far the community has not felt the impact of the government subsidies. However, of course the implementation of this program has challenges, opportunities and weaknesses.

This type of research uses descriptive qualitative methods. Data was collected in this study using observation techniques, interviews, Focused Group Discussions (FGD) and documentations study. Data analysis is performed by collecting data, analyzing data, presenting data and drawing conclusions using SWOT Methods. From the results of the study it can be concluded that the “Program BBM I Harga” increases public confidence in the government. In addition, this program will not be a burden on the state budget because it is purely carried out by PT Pertamina (Persero). However, behind that there are weaknesses in this Program. The Program is not yet supported by other facilities such as the availability of electricity and infeasible transportation links. This program can provide a good opportunity for Pertamina to open new LPG Stores or to promote Pertamina products. While the challenge of this program is that illegal retailers are still operating, which allows people who are far from gas stations to have yet to experience the overall price of the Premium 6.500 Rupiah per litre and Solar 5.500 per litre.

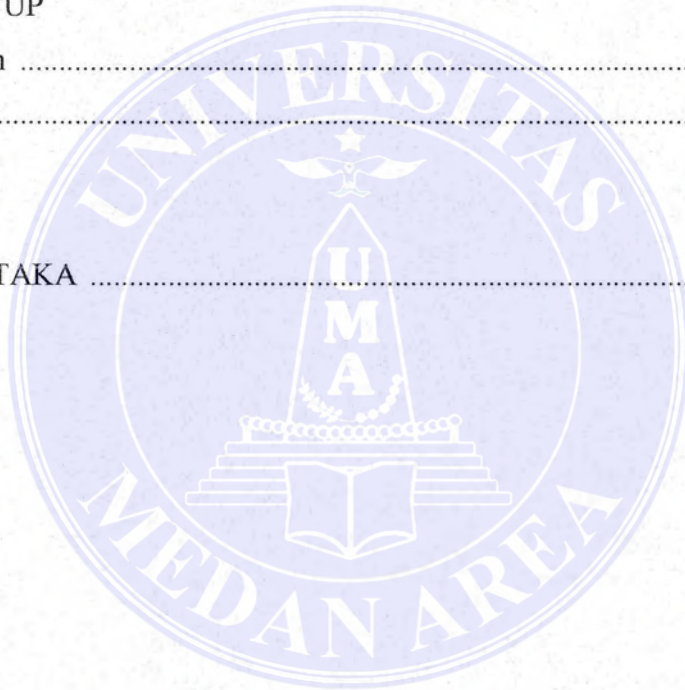
It is expected that in the future in terms of equitable development in the 3T areas, the Government not only seek at the availability of fuel, but also about the availability of adequate facilities such as the availability of clean water, electricity, transportation routes, transportation fleets, health services, education and so forth.

Key Words: Policy Analysis, SWOT Methods, Program BBM I Harga

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
HALAMAN PERSETUJUASN	i
HALAMAN PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR BAGAN	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Manfaat Penelitian	10
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1. Pengertian Kebijakan	11
2.2. Tahapan Program BBM 1 Harga PT Pertamina (Persero)	15
2.3. Analisis SWOT	20
2.4. Penelitian Terdahulu	28
2.5. Kerangka Pemikiran	29
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian	32
3.2. Bentuk Penelitian	32

3.3. Metode Pengumpulan Data	35
3.4. Teknik Analisis Data	44
BAB IV PEMBAHASAN	
4.1. Hasil Penelitian	45
4.2. Hasil Analisa SWOT Terhadap Program BBM 1 Harga	66
BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan	81
5.2. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	84



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemenuhan kebutuhan masyarakat yang adil dan beradab masih menjadi agenda besar pemerintah dalam setiap rencana pembangunan. Walaupun, tidak jarang kita mendengar masalah kesenjangan pembangunan diantara Indonesia bagian Timur dengan Indonesia bagian Barat. Masalah kesenjangan ini pernah diungkapkan oleh Saratri Wilonoyudho dalam jurnal Kesenjangan Dalam Pembangunan Kewilayahan (2009), kesenjangan pembangunan Indonesia Barat dan Indonesia Timur merupakan isu umum. Selanjutnya Wilonoyudho (2009) dalam jurnalnya tersebut menyebutkan kesenjangan terjadi dalam bidang ekonomi. Misalnya perbedaan peningkatan nilai tambah sektor manufaktur antara wilayah Barat dan Timur. Papua dengan hasil alam yang berlimpah belum memiliki pabrik padat karya yang bisa menampung ratusan pekerja lokal. Walau tidak bisa dipungkiri hal ini juga harus serentak dengan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Tujuan Pemerintah Indonesia berdasarkan UUD 1945 adalah untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Bukan hanya yang berada di wilayah-wilayah strategis, akan tetapi seluruh wilayah yang menjadi kekuasaan Pemerintahan Indonesia.

Salah satu peran pemerintah dalam perekonomian adalah melalui intervensi/

kebijakan sektor publik, dimana salah satu ruang lingkup

sektor publik adalah perusahaan milik negara. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional, di samping badan usaha swasta dan koperasi. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BUMN, swasta dan koperasi melaksanakan peran saling mendukung berdasarkan demokrasi ekonomi.

Pertamina adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang pertambangan minyak dan gas bumi, pengelolaan dan distribusi penjualan kepada masyarakat. Bahan Bakar Minyak seperti Solar, Premium, dan Pertalite saat ini merupakan barang yang penting bagi masyarakat dalam menggerakkan perekonomian. Namun permasalahannya terletak pada keberagaman harga BBM di sepanjang negara kepulauan kita, khususnya pada wilayah-wilayah kategori tertinggal di Indonesia. Sulitnya akses transportasi, infrastruktur yang kurang memadai, serta jauhnya lokasi membuat harga BBM di beberapa wilayah tersebut melonjak tinggi dibandingkan dengan harga BBM dipertanian. Kesulitan-kesulitan tersebut membuat harga dan biaya angkut dalam distribusi BBM menjadi tinggi

Fokus Pembangunan nasional Indonesia saat ini adalah wilayah-wilayah yang dikategorikan sebagai wilayah 3T. 3T merupakan singkatan dari daerah tertinggal, terdepan dan terluar. Menurut Peraturan Presiden Nomor 131 tahun 2015 Daerah

tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Suatu daerah ditetapkan sebagai Daerah Tertinggal berdasarkan kriteria:

- Perekonomian masyarakat. Perekonomian masyarakat yang masih sangat tergantung dari alam dan bukan industri. Misalnya pertanian, kebun dan bertani.
- Sumber Daya Manusia. Kualitas sumber daya manusia di daerah tertinggal masih rendah. Misalnya masih rendahnya angka partisipasi di Sekolah, jumlah masyarakat yang masih buta huruf.
- Sarana dan Prasarana. Kurangnya infrastruktur seperti rumah sakit, pasar dan tenaga medis serta tidak tersedia jaringan komunikasi yang memadai.
- Aksesibilitas. Maksudnya adalah rata-rata jarak dan waktu tempuh dari kantor Desa/ kelurahan ke kantor Kabupaten yang membawahi.

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jendral Minyak dan Gas Bumi nomor 09.K/10/DJM.0/2017, Provinsi Sumatera Utara memiliki 4 (empat) Kabupaten dari 33 Kabupaten/Kota yang termasuk dalam wilayah 3T, yaitu:

- Kabupaten Nias
- Kabupaten Nias Barat
- Kabupaten Nias Selatan, dan
- Kabupaten Nias Utara

Di Sumatera Utara, hampir tidak ada yang tidak mengenal Kepulauan Nias, sebuah daerah kepulauan di bagian barat provinsi Sumut yang memiliki luas

wilayah sekitar 5.625 km per segi. Kepulauan Nias terdiri dari lima daerah, yakni Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Selatan, dan Kota Gunung Sitoli dengan penduduk sekitar 700 ribu jiwa.

Kabupaten Nias Selatan dengan ibu kota Teluk Dalam terdiri dari 32 kecamatan yakni Amandraya, Aramo, Boronadu, Fanayama, Luahagundre Manimolo, Gomo, Haruna, Hibala, Hilimegai, Hilisalawa'Ahe, Lahusa, Mazino, Lolomatua, Lolowa'u, Maniamolo, Mazo, O'o'u, Onohazumba, Pulau-pulau Batu, Pulau-pulau Batu Timur, Pulau-pulau Batu Barat, Pulau-pulau Batu Utara, Sisua Ori, Simuk, Somambawa, Susua, Tanah Masa, Teluk Dalam, Toma, Umbunasi, Ulunoyo, dan Ulususua. Kabupaten itu memiliki luas wilayah sekitar 1.825 km persegi dengan penduduk sekitar 275 ribu jiwa atau tingkat kepadatan 150 jiwa per km persegi.

Kepulauan Nias berjarak sekitar 85 mil laut dari Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah dengan waktu tempuh sekitar 10 jam melalui laut dan bersandar di Pelabuhan Angin. Sedangkan melalui udara, penerbangan menuju Bandara Binaka Kepulauan Nias dapat ditempuh sekitar satu jam dari Bandara Kualanamu. Tetapi penerbangan tersebut tidak tersedia setiap hari. Hal ini juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan Kabupaten Nias masuk dalam kategori wilayah 3T di Provinsi Sumatera Utara, dimana terdapat beberapa wilayah yang berada jauh dari pusat kota. Adapun lokasi yang menjadi target pembangunan Lembaga Penyalur Program BBM 1 Harga di Kabupaten Nias Selatan adalah sebagai berikut:

- Desa Sinauru – Kecamatan Pulau – Pulau Batu
- Desa Hilinifaese, Hibala
- Desa Tetezou, Kecamatan Lahusa
- Desa Lolowau, Kecamatan Lolowau
- Kecamatan Hibala

Penghasilan utama penduduknya sebagian besar masih mengandalkan sektor pertanian dengan luas lahan potensial sekitar 81 ribu hektar lebih dan selebihnya berprofesi sebagai nelayan (sumber; wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Nias. 2020). Disebabkan wilayah kepulauan, Nias yang berada di Samudera Hindia memiliki potensi sumber daya laut yang luar biasa, termasuk sejumlah pantai yang sangat indah dan alami yang layak menjadi potensi obyek wisata selancar.

Salah satu faktor utama yang menghambat pertumbuhan di Kepulauan Nias adalah aksesibilitas atau transportasi untuk mencapai kecamatan-kecamatan atau desa-desa yang berada di Kabupaten Nias Selatan tersebut. Selain itu, untuk mengembangkan potensi di Kepulauan Nias, perlu adanya pembaruan dari masyarakat di luar pulau Nias. Kehadiran transmigran tersebut diperkirakan akan menimbulkan nuansa heterogenitas bagi penduduk Kepulauan Nias yang selama ini dinilai masih homogen. Kehadiran transmigran tersebut diperkirakan akan mendukung proses asimilasi dan sosialisasi yang cukup positif dalam perkembangan karakter masyarakat di Kepulauan Nias.

Namun, kondisi ril yang terjadi adalah sangat banyak pekerja ataupun wisatawan kurang berminat berkunjung ke wilayah ini. Bahkan ada isilah dikalangan pekerja kalau dipindahkan ke Nias Selatan merupakan sebuah sanksi.

Masyarakat yang berada pada wilayah-wilayah tersebut juga belum merasakan pembangunan yang adil. Dari segi pendidikan, tidak banyak gedung sekolah yang memadai pada daerah tersebut. Hal ini dikarenakan minimnya fasilitas umum dan sulitnya moda transportasi. Kalaupun ada, biayanya cukup tinggi. Dari Bandara Gunung Sitoli menuju Kota Teluk Dalam tidak ada bus bandara, sehingga para pengunjung atau warga menumpang mobil carter dengan tarif Rp.150.000,-.

Karena alasan sulitnya transportasi ke Nias Selatan, hal ini berdampak pada tingginya harga barang-barang sandang, pangan dan papan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tidak terkecuali harga BBM. Sebelum adanya Program BBM 1 Harga, kebutuhan masyarakat akan bahan bakar minyak disalurkan oleh pedagang eceran. Para pedagang eceran dikecamatan terpencil di Kabupaten Nias Selatan tersebut mendapatkan BBM dari SPBU yang berada di Kota Teluk Dalam kemudian membawa minyak tersebut ke wilayah mereka. Harga 1 liter BBM pun bervariasi, mulai dari Rp.10.000,- s.d. Rp. 15.000,- per liter.

Bahan Bakar Minyak atau disingkat BBM saat ini menjadi salah satu kebutuhan dalam masyarakat. Kenaikan harga BBM menjadi salah satu penyebab naiknya harga bahan kebutuhan pokok. Hal ini senada dengan hasil penelitian Harunrasyid (2013), yang dituangkan dalam jurnal Pengaruh Perubahan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Terhadap Tingkat Inflasi di Indonesia, dimana kesimpulan dari

Jurnal tersebut menyatakan bahwa perubahan harga BBM berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat inflasi di Indonesia. Pengaruh harga BBM cenderung lebih besar dampaknya terhadap inflasi pada kelompok bahan makanan dan kelompok transportasi dan komunikasi daripada terhadap kelompok pengeluaran lainnya. Pemerintah memang telah menggulirkan beberapa aturan untuk meringankan beban rakyat pengguna BBM, diantaranya:

- Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2006. Dimana peraturan ini menjelaskan tentang Harga Jual Eceran Minyak Tanah (*kerosene*) senilai Rp. 2000,-/ liter, Solar (*gas oil*) Rp. 4.300,-/ liter dan Premium seharga Rp. 4.500,-/ liter untuk usaha kecil, usaha perikanan, transportasi dan pelayanan umum.
- Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu. Peraturan ini lebih merincikan siapa penyedia BBM, penetapan harga patokan jenis BBM, aturan penyaluran dan penerimaan BBM impor.
- Peraturan Menteri Keuangan nomor 03/PMK.02/2009 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan dan Pembayaran Subsidi Bahan Bakar Minyak Jenis BBM Tertentu. BBM Tertentu yang dimaksud dalam hal ini adalah bahan bakar yang diolah/ berasal dari Minyak bumi dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu. Peraturan ini mengatur perihal perhitungan Subsidi BBM.

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Peraturan ini menegaskan perihal Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) yang harus disalurkan kepada masyarakat dan mendapatkan subsidi pemerintah dan Jenis Bahan Bakar khusus penugasan (produk Premium), dimana produk ini tidak mendapatkan subsidi lagi dan harganya ditetapkan oleh Pemerintah.

Namun, pada kenyataannya kebijakan-kebijakan subsidi tersebut belum dirasakan menyeluruh oleh masyarakat yang berada pada wilayah 3T. Masyarakat yang berada pada wilayah 3T tersebut masih harus mengeluarkan biaya tambahan untuk mendapatkan minyak subsidi dikarenakan ketiadaan Lembaga Penyalur Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) pada wilayah-wilayah tersebut. Ketidadaan fasilitas SPBU pada wilayah 3T disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya:

- Belum ada pengusaha yang tertarik untuk mendirikan SPBU pada wilayah tersebut.
- Lokasi SPBU di wilayah 3T bukan merupakan potensial profit karena pengiriman BBM tentu akan memakan biaya yang cukup banyak.
- Belum stabilnya listrik, sehingga dikhawatirkan akan menghambat operasional SPBU dikemudian hari.

Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah untuk dapat memberikan keadilan bagi masyarakat di wilayah 3T khususnya Kabupaten Nias Selatan. Agar layanan BBM murah bisa dirasakan oleh masyarakat yang berada di daerah-

daerah terluar, terdepan dan tertinggal maka pada tahun 2016 Pemerintah mengeluarkan kebijakan "BBM 1 Harga" melalui Peraturan kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 09.K/10/DJM.0/2017. Sebelumnya, harga BBM pada wilayah 3T bervariasi, mulai dari Rp. 10.000 sampai dengan Rp. 15.000,-/ liter. Kebijakan tersebut dilaksanakan melalui BUMN penyedia energi Indonesia yakni Pertamina. Pertamina ditugaskan untuk menghadirkan Lembaga Penyalur khusus pada wilayah 3T dengan harapan agar masyarakat yang berada pada wilayah tersebut tidak lagi mengalami kesulitan untuk mendapatkan BBM. Tantangan tersebut harus dijawab dengan positif dan semangat pemenuhan kebutuhan masyarakat akan energi. Bagaimana kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan Program Kebijakan BBM 1 Harga PT Pertamina agar bisa terus beroperasi terutama di Kabupaten Nias Selatan menjadi hal yang menarik bagi penulis untuk melakukan analisis terhadap Program tersebut. Hal inilah yang menjadi pertimbangan Penulis untuk mengangkat judul "*Analisis Program BBM 1 Harga PT Pertamina (Persero) di Kabupaten Nias Selatan*".

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, perumusan masalah diformulasikan sebagai berikut:

1. Program BBM 1 Harga telah diluncurkan sejak Tahun 2017. Apa saja yang menjadi kekuatan dari Program ini bagi masyarakat yang tinggal di wilayah 3T.

2. Apakah kelemahan dari Program BBM 1 Harga ini baik dari sisi masyarakat selaku objek program ataupun dari Pertamina selaku pelaksana program BBM 1 Harga.
3. Apa saja tantangan dalam pelaksanaan Program BBM 1 Harga di Kabupaten Nias Selatan.
4. Bagaimana peluang yang diciptakan dari Program BBM 1 Harga baik bagi Pemerintah maupun dari Pertamina.

1.3. Tujuan Penelitian

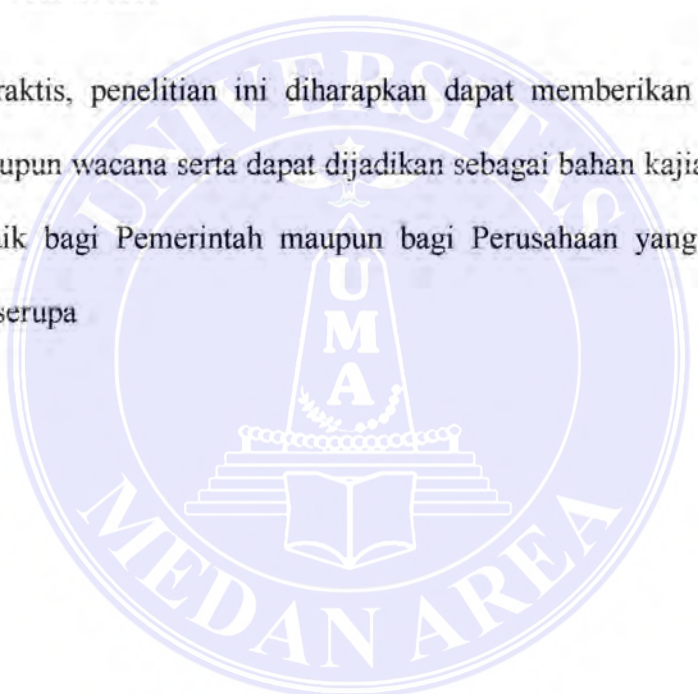
Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kekuatan Program BBM 1 Harga dalam mengatasi masalah kebutuhan BBM di Kabupaten Nias Selatan.
2. Untuk mengetahui kelemahan Program BBM 1 Harga.
3. Untuk mengetahui tantangan dalam keberlangsungan Program BBM 1 Harga ke depannya.
4. Untuk mengetahui peluang apa yang diciptakan dengan adanya Program BBM 1 Harga.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan studi ilmu pemerintahan, dalam hal ini Administrasi Publik, dan menambah bahan bacaan bagi peneliti mengenai hal - hal yang berkaitan dengan kebijakan Pemerintah.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, saran, ataupun wacana serta dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi semua pihak, baik bagi Pemerintah maupun bagi Perusahaan yang menjalankan Program serupa



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pengertian Kebijakan

Beberapa ilmuwan menjelaskan berbagai macam mengenai kebijakan diantaranya adalah Friedrich dalam Wahab (1991;13) dalam Joko Widodo (2018;13) “Analisis Kebijakan Publik”, Kebijakan dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Sementara itu menurut Leslie A. Pal (1987;2) dalam Joko Widodo (2018;10) definisi kebijakan dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) kelompok besar:

- Definisi yang lebih menekankan pada maksud dan tujuan utama sebagai kunci kriteria kebijakan. Ini dapat diartikan sebagai tujuan utama dari sebuah tindakan yang dilaksanakan oleh orang atau sekelompok orang dalam memecahkan masalah publik atau dengan bahasa yang lebih sederhana adalah apapun tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi.
- Pengertian kebijakan pada kategori yang lebih menekankan pada dampak. Ini maksudnya adalah tindakan yang diambil oleh Pemerintah atau apa yang sedang dikerjakan Pemerintah dan mengapa Pemerintah melakukan hal

Pengertian Kebijakan menurut William Dun (1999) yang dikutip dari artikel *online* pendidikan.com, “Kebijakan ialah aturan tertulis yang merupakan suatu keputusan formal organisasi, yang mempunyai sifat yang mengikat, yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk dapat menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat”. Kebijakan akan menjadi rujukan utama para anggota organisasi atau juga anggota masyarakat didalam berperilaku. Kebijakan pada umumnya memiliki sifat *problem solving* serta proaktif. Berbeda dengan Hukum (*Law*) dan juga Peraturan (*Regulation*), kebijakan lebih memiliki sifat adaptif dan intepretatif, walaupun kebijakan juga mengatur “apa yang boleh, serta apa yang tidak boleh”. Kebijakan juga diharapkan dapat bersifat umum namun tanpa menghilangkan ciri lokal yang spesifik. Maksudnya adalah kebijakan itu harus memberi peluang diintepretasikan sesuai dengan kondisi spesifik yang ada.”

Menurut James E. Anderson dalam artikel *online* wordpress.com yang diakses pada tanggal 30 Oktober 2019 tentang pengertian kebijakan menyatakan kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.

Pengertian ini memberikan pemahaman bahwa kebijakan dapat berasal dari seorang pelaku atau sekelompok pelaku yang berisi serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu. Kebijakan ini diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku dalam rangka memecahkan suatu masalah tertentu.

James E. Anderson secara lebih jelas menyatakan bahwa yang dimaksud kebijakan adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Pengertian ini, menurutnya, berimplikasi:

- bahwa kebijakan selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan,
- bahwa kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah,
- bahwa kebijakan merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah,
- bahwa kebijakan bisa bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu,
- bahwa kebijakan, dalam arti positif, didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa (otoritatif). Dalam pengertian ini, James E. Anderson menyatakan bahwa kebijakan selalu terkait dengan apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah.

Pernyataan bahwa kebijakan terkait dengan pemerintah tidak hanya disampaikan oleh James E. Anderson. George C. Edwards III dan Ira Sharkansky mengemukakan pengertian kebijakan sebagai apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan itu dapat berupa sasaran atau tujuan dari program-program pemerintah. Penetapan kebijakan tersebut dapat

secara jelas diwujudkan dalam peraturan-peraturan perundang-undangan atau dalam pidato-pidato pejabat teras pemerintah serta program-program dan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah.

2.1.1. Pengertian Program BBM 1 Harga

Kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga adalah kebijakan menyeragamkan harga jual resmi BBM sebesar Rp. 6.500/ liter Premium dan Rp.5.500/ liter Solar di beberapa daerah pelosok.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jendral Minyak dan Gas Bumi Nomor 09.K/10/DJM.0/2017 tentang Lokasi Tertentu Untuk Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, SK Dirjen Migas ini menetapkan 148 titik Kabupaten sebagai wilayah yang harus didirikan Lembaga Penyalur Program BBM 1 Harga. Kemudian Pemerintah melalui Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas) ditugaskan untuk mengatur pelaksanaan penyaluran BBM penugasan tersebut.

Berdasarkan UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian BBM yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang pelaksanaam dan pengaturan serta pengawasan kegiatan usaha tersebut dilaksanakan oleh BPH Migas. Pasal 46 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 ayat (1) menyatakan bahwa Pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan

pendistribusian BBM dan pengangkutan gas bumi melalui pipa dilakukan oleh Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4). Sedangkan dalam ayat (2) disebutkan bahwa Fungsi Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan pengaturan agar ketersediaan dan distribusi BBM dan gas bumi yang ditetapkan Pemerintah dapat terjamin di seluruh wilayah NKRI serta meningkatkan pemanfaatan gas bumi di dalam negeri.

BPH Migas kemudian memberikan target percepatan pendirian SPBU Program BBM 1 Harga ke PT Pertamina (Persero) melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Secara Nasional. Melalui Permen ESDM ini pemerintah menegaskan kembali perihal penyaluran BBM pada wilayah tertentu oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Pertamina. Dimana apabila Pertamina tidak segera merealisasikan hal tersebut maka Badan Pengawas dalam hal ini BPH Migas agar melakukan teguran tertulis. Hal ini juga sekaligus membuktikan keseriusan Pemerintah dalam menyalurkan BBM ke wilayah-wilayah 3T.

2.2. Tahapan Program BBM 1 Harga PT Pertamina (Persero)

2.2.1. Penetapan Lokasi 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar)

Dasar hukum melaksanakan Program BBM 1 Harga di Pertamina (Persero) ini adalah Keputusan Dirjen Migas Nomor 09.K/10/DJM.O/2017, tanggal 23 Januari

UNIVERSITAS MEDAN AREA **Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral** tentang Ketentuan Untuk Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Tertentu

(JBT) dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP). Adapun yang dimaksud dengan JBT dan JBKP ini Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM, terdapat 3 kategori jenis BBM yaitu *pertama*, Jenis BBM Tertentu (JBT) yang harganya ditetapkan Pemerintah dan diberikan subsidi yaitu Minyak Solar dan Minyak Tanah. *Kedua*, Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) tidak diberikan subsidi, diberikan biaya tambahan 2% dan didistribusikan di wilayah non Jawa, Madura, Bali (Jamali) yaitu Bensin RON 88 atau yang lebih dikenal oleh pasaran dengan Premium.

Berdasarkan Kep. Dirjen Migas diatas Pertamina selaku BUMN penyedia energi di Indonesia ditugaskan untuk menghadirkan lembaga penyalur pada Kabupaten – Kabupaten yang masuk dalam kategori 3T yang sudah dilampirkan wilayah-wilayah nya dalam Kep. Dirjen Migas Nomor 09. Pembangunan Lembaga Penyalur yang biasa disebut dengan Stasiun Bahan Bakar Umum ini nantinya diharapkan bisa menyalurkan BBM jenis Premium dan Solar dengan harga yang sama seperti pada SPBU lainnya yakni Rp. 6.500,-/ liter untuk Premium dan Rp. 5.500,-/liter untuk Solar/Biosolar. Sehingga hal ini bisa mewujudkan keadilan bagi masyarakat yang berada diwilayah 3T akan BBM. Kabupaten Nias Selatan menjadi salah satu target Program ini.

Pertamina *Retail Sales Marketing Operation Region 1* (MOR 1) melakukan evaluasi melalui tim sales dilapangan perihal titik/ lokasi kecamatan yang memungkinkan dan sangat perlu untuk dibangun SPBU Program BBM 1 Harga.

UNIVERSITAS MEDAN AREA Kecamatan yang ada di kabupaten Nias Selatan, terpilih lah

Kecamatan Pulau – Pulau Batu, Kecamatan Hibala, Kecamatan Lahusa dan Kecamatan Lolowau. Kecamatan ini kemudian menjadi target Pembangunan SPBU Program 1 Harga.

2.2.2. Mencari Investor

Pada tahapan ini Pertamina MOR I melakukan pendekatan kepada Pengusaha-pengusaha lokal dan juga pengusaha swasta minyak bumi yang tergabung dalam Hiswana, khususnya yang berada di Kabupaten Nias Selatan ataupun diluar kabupaten tersebut untuk berinvestasi mendirikan SPBU pada lokasi-lokasi yang sudah ditentukan dalam Surat Keputusan Direktur Jendral Minyak dan Gas Bumi nomor 09.K/10/DJM.0/2017.

2.2.3. Pengajuan atau Permohonan Pengusaha Untuk Menjadi Mitra Pertamina

Para pengusaha yang berminat selanjutnya melakukan permohonan untuk menjadi Mitra Pertamina dalam penyaluran BBM 1 Harga. Usulan tersebut kemudian dievaluasi secara detail oleh tim sales untuk selanjutnya diusulkan ke Pertamina kantor Pusat Pertamina di Jakarta tujuan *Vice President Fuel Sales*.

2.2.4. Koordinasi Dengan Transportir

Transportir yang dimaksudkan dalam hal ini adalah perusahaan penyedia sarana yang digunakan untuk menyalurkan BBM kepada SPBU yang berada di lokasi Program BBM 1 Harga. Selama ini Transportir yang digunakan Pertamina untuk menyalurkan BBM adalah PT. Patra Niaga dan PT. Elnusa Petrofin, maka

demikian juga dengan transportir untuk kec. Pulau – Pulau Batu, Kecamatan Lahusa, Kecamatan, Hibala dan Lolowau juga menggunakan Jasa PT. Patra Niaga dan PT. Elnusa Petrofin.

2.2.5. Survei Moda Transportasi

Pertamina bersama-sama dengan PT. Patra Niaga dan PT. Elnusa Petrofin selaku transportir melakukan *survei* moda transportasi. Survei dilaksanakan bertujuan untuk menentukan tarif ongkos angkut yang murni 100% ditanggung oleh Pertamina. Untuk menyalurkan BBM kepada 4 (empat) kecamatan di Kabupaten Nias Selatan menggunakan armada mobil tanki dan kapal dikarenakan lokasi SPBU yang berada terpisah dengan lokasi Terminal BBM Sibolga.

2.2.6. Kelengkapan Dokumen Pembangunan SPBU oleh Pengusaha

Setelah mendapatkan persetujuan dari Kantor Pusat Pertamina, selanjutnya para Mitra yang sudah disetujui melengkapi kelengkapan dokumen pembangunan. Bukan hanya persyaratan dari Pertamina saja. Namun juga terdapat beberapa izin dari Pemda setempat. Berikut adalah beberapa standar dokumen yang diperlukan untuk mendirikan SPBU tersebut:

- IMB (Izin Mendirikan Bangunan)
- NIB (Nomor Induk Berusaha), dimana tergabung didalamnya Izin Usaha, Izin Lokasi, Izin Lingkungan dan Izin Komersial
- Izin Prinsip pembangunan dari Pemda Setempat
- Bukti Kepemilikan Tanah, dll.

Setelah kelengkapan tersebut dipenuhi barulah proses pembangunan SPBU bisa dilaksanakan.

2.2.7 Pembangunan SPBU Program 1 Harga

Sebelum dilakukan pembangunan SPBU, Pertamina akan mengadakan *kick off meeting* yang membahas perihal *layout* atau desain bangunan SPBU. Apakah bangunan tersebut telah layak dari sisi teknis dan keselamatan. Adapun yang hadir dalam *kick off meeting* tersebut adalah *Retail Sales Manager*, perwakilan dari fungsi *Human, Safety, Security and Environment (HSSE)*, perwakilan dari fungsi Teknik dan *administration officer*.

Dalam tahapan pembangunan pertama ini Pengusaha diberikan waktu selama 6 (enam) bulan untuk melakukan pembangunan SPBU tersebut. Kemudian setelah selesai pembangunan tim HSSE dan *Technical Service (TS)* akan melakukan pengecekan fisik pembangunan SPBU apakah sudah laik untuk beroperasi atau apakah masih terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki dari segi keamanan dan teknis operasional.

2.2.8 Pemeriksaan Fisik SPBU

Apabila pembangunan telah selesai dilaksanakan, maka pengusaha kembali akan menghubungi Sales Branch Manager agar dapat dilakukan pemeriksaan fisik SPBU yang telah selesai dibangun. Pengecekan bangunan tersebut kembali dilaksanakan oleh fungsi HSSE dan *technical services* Pertamina. Hal yang menjadi konsentrasi dalam pemeriksaan ini adalah apakah bangunan SPBU telah

UNIVERSITAS MEDAN AREA
Dibangun sesuai dengan *layout design* yang disetujui pada saat *kick off meeting*.

Document Accepted 21/8/23

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

2.2.9. Perikatan Kerjasama Pengusahaan SPBU (Kontrak) sekaligus Pengisian Perdana Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Bahan Bakar Khusus (BBK)

Setelah dinyatakan layak operasi oleh tim HSSE dan *Engineering Services/ Technical Services*, selanjutnya tim *retail sales* akan melakukan penandatanganan pengusahaan SPBU dengan pengusaha (kontrak). Kontrak tersebut memuat kesepakatan antara Pertamina dengan pemilik SPBU dalam penyaluran BBM dan BBK (Bahan Bakar Khusus) kepada masyarakat. Seiring dengan hal tersebut Pertamina menerbitkan surat pengisian perdana BBM dan BBK yang dikenal dengan istilah tera metrologi, dimana ini merupakan kali pertama transaksi penjualan bahan bakar kepada SPBU tersebut untuk keperluan uji tera *nozzle* dari Dinas Metrologi.

2.2.10. Operasional

Apabila SPBU telah lulus uji tera dari metrologi, pihak SPBU akan melaporkan hal tersebut kepada Pertamina dan meminta agar SPBU tersebut dapat dioperasionalkan. Pertamina melakukan pengecekan dokumen dan menerbitkan surat pelayanan kepada konsumen atau yang lazim disebut dengan surat izin operasional.

2.3. Analisis SWOT

2.3.1. Pengertian Analisis SWOT

Metode Analisis *Strength, Weakness, Opportunities, Threats* atau yang biasa dikenal dengan Metode Analisis SWOT pertama kali dikemukakan oleh Humphey

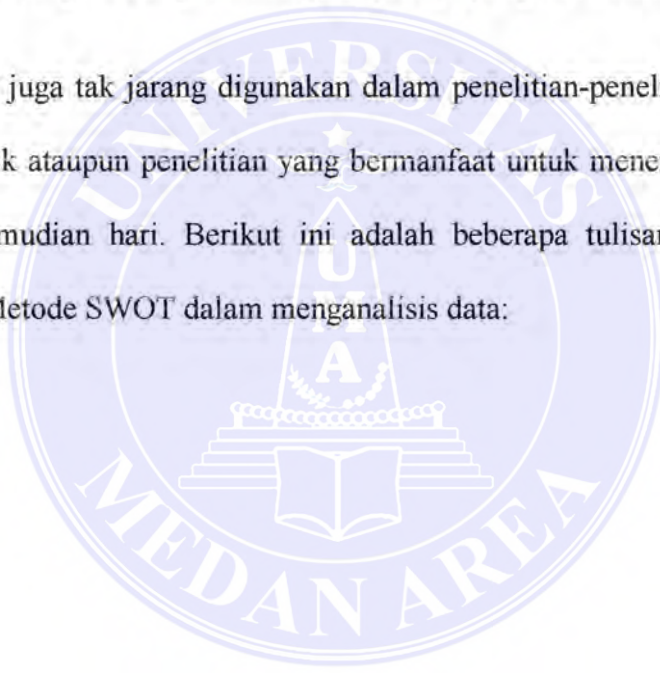
pada tahun 1960-an dan 1970-an yang saat itu mengadakan riset pada *Stanford University* dengan menggunakan data dari perusahaan Fortune 500.

Menurut Robinson dan Pearce (1997) dalam artikel <https://idtesis.com> yang dikutip pada tanggal 02 Desember 2019 menjelaskan analisis SWOT merupakan salah satu komponen penting dalam manajemen strategis. Analisis SWOT ini mencakup faktor internal perusahaan. Dimana nantinya akan menghasilkan profil perusahaan atau kegiatan sekaligus memahami dan mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan organisasi. Kelemahan dan kekuatan ini kemudian akan dibandingkan dengan ancaman eksternal dan peluang sebagai dasar untuk menghasilkan opsi atau alternatif strategi lain.

Pendapat lain dikemukakan Rangkuti (1997) dalam <https://idtesis.com> yang dikutip pada tanggal 02 Desember 2019 menyatakan bahwa pengertian SWOT adalah proses identifikasi berbagai faktor yang dilakukan secara sistematis agar bisa merumuskan strategi dengan tepat. Analisis dilakukan berdasarkan logika yang bisa mengoptimalkan kekuatan atau *strengths* serta peluang atau *opportunities*. Tapi secara beriringan, analisis ini juga harus bisa meminimalkan ancaman atau *threats* dan kelemahan atau *weaknesses*. Proses dalam pengambilan keputusan strategis diketahui memang selalu berhubungan langsung dengan kebijakan perusahaan, strategi, tujuan dan pengembangan misi. Artinya, perencana harus menganalisa berbagai faktor strategis organisasi atau perusahaan mulai dari kekuatan, peluang, ancaman dan kelemahan.

Untuk menganalisis Program BBM 1 Harga di Kabupaten Nias Selatan ini, penulis memilih analisis SWOT karena metode ini akan memberikan analisa yang berimbang tidak hanya dari kekuatan program BBM 1 Harga secara umum. Tetapi, nantinya juga akan terlihat apa saja kelemahan yang membutuhkan perbaikannya untuk program pemerintah kedepannya. Selain itu, metode ini akan memberikan gambaran mengenai peluang apa saja yang dihasilkan oleh adanya Program BBM 1 Harga sekaligus tantangan apa saja yang akan dihadapi.

Analisis SWOT juga tak jarang digunakan dalam penelitian-penelitian mengenai Kebijakan Publik ataupun penelitian yang bermanfaat untuk menentukan strategi organisasi dikemudian hari. Berikut ini adalah beberapa tulisan ilmiah yang menggunakan Metode SWOT dalam menganalisis data:



No	Judul Tulsan	Keterangan	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Jurnal: Analisis SWOT terhadap Kebijakan Pengembangan Pariwisata Provinsi Bali	Ditulis oleh Yulius Habita Nggini, Februari 2019. Universitas Pendidikan Nasional	Kualitatif- Analisis SWOT	SWOT terhadap kebijakan pengembangan destinasi pariwisata, Sumber Daya Pariwisata, Industri pariwisata, jadi kekuatannya adalah mempunyai adat istiadat yang kuat dan mempunyai keindahan alam, pantai dan lain-lain yang bisa dikembangkan. Kelemahannya adalah kurangnya sumber daya manusia, sumber dana penyelenggaraan, ketimpangan pembangunan antara Bali Selatan dengan Bali Utara dan peluangnya adalah Bali sudah mempunyai <i>Branding Top</i> dunia, apa saja yang bisa dikembangkan berdasarkan kebijakan bisa menjadi tolak ukur dalam mensejahterakan masyarakat. Ancamannya adalah sepuluh Bali baru yang bisa mengancam keberadaan Bali atau eksistensi dari pada Bali itu sendiri. Oleh karena itu Bali harus melakukan inovasi baru dalam mempertahankan eksistensi dari Pariwisata Bali.
2	Jurnal: Analisis Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Banten	Ditulis oleh Rah Adi Fahmi, Sugeng Setyadi dan Umayatu Suiroh. 2018. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	Deskriptif-Analisis SWOT	Kebijakan maupun Program yang tertuang dalam rencana pembangunan Provinsi Banten dalam kaitannya dengan penanggulangan kemiskinan sudah cukup komprehensif.
3	Jurnal: Analisis Kebijakan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Jambi	Ditulis Oleh Supriyanto, Syarifudin, Ardi. 2018. Program Studi Ilmu Lingkungan, Universitas Jambi	Kualitatif-Analisis SWOT	Kelemahan dari Kebijakan kebakaran hutan antara lain: (a) terlalu banyak peraturan kebakaran hutan dan lahan yang pengimplementasiannya tidak terkoordinir dengan baik. (b) Pendekatan yang dilakukan bersifat sektoral dan hanya focus pada masalah kebakaran hutan dan lahan. (c) Usaha-usaha penanganan karhutla hanya melalui pendekatan kuratif dibandingkan dengan preventif. (d) Besarnya benturan kepentingan berbagai pihak dalam pemanfaatan sumber daya alam. (e) Kurang jelasnya definisi mengenai tanggung jawab penanganan kebakaran hutan dan lahan
4	Jurnal: Analisis SWOT: Strategi Pengembangan Kelompok Penelitian	Ditulis oleh Tri Widianto dan Sih Damayanti, 2015. <i>Annual Meeting on Testing and Quality</i> . Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	Analisis SWOT dengan cara melakukan pemetaan kondisi organisasi dengan melakukan penilaian faktor internal dan eksternal	Strategi Promosi profil peneliti melalui peningkatan penerbitan publikasi ilmiah nasional dan internasional secara umum dinilai dapat mendukung keseluruhan sasaran strategis institusi dengan nilai bobot terhadap sasaran 1 sampai 4 berturut-turut menurut koordinat kelompok penelitian.
5	Tesis: Analisis Kebijakan Pengembangan Wisata Bahari (Kasus Pulau Tagalaya dan Pulau Kumo di Kabupaten Halmahera Utara)	Ditulis oleh Joice Betsy Mahura, 2010. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor	Deskriptif-Analisis SWOT	Sumberdaya pesisir bahari Pulau Tagalaya dan Kuno memiliki potensi dan daya dukung untuk pengembangan wisata bahari. Obyek wisata berupa pantai pasir putih yang indah, taman laut (terumbu karang dan biota didalamnya) alami dan asri, kondisi perairan yang tenang dan jernih, menjadi daya tarik berunjungnya wisatawan. Pengembangan wisata bahari berdampak positif bagi masyarakat Pulau Tagalaya dan Pulau Kumo. Pemangku kepentingan lainnya baik pemerintah dan swasta dapat berbagi peran dalam pengelolaan wisata bahari secara proporsional dan profesional diantara masing-masing pihak (konsep-konsep management).

Tabel. 2.1. Tulisan Ilmiah yang menggunakan Analisis SWOT sebagai Metode Penelitian (Sumber: *Diolah oleh Peneliti, 2020*).

2.3.2. Tujuan dan Manfaat Analisis SWOT

2.3.2.1. Tujuan Analisis SWOT

Tujuan dan manfaat analisis SWOT adalah untuk memadukan 4 faktor atau komposisi secara tepat tentang bagaimana kekuatan (*strengths*), mengatasi kelemahan (*weaknesses*), menemukan peluang (*opportunities*) dan strategi menghadapi beragam ancaman (*threats*). Analisis SWOT merupakan suatu sistem kesatuan yang memiliki berbagai komponen yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi dan bergerak secara serentak kearah yang sama pula.

Hasil dari suatu analisis ini dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kekuatan dan mempertahankan peluang, serta pada saat yang bersamaan mengurangi kelemahan dan dapat menghindari potensi ancaman. Diharapkan dengan menggunakan metode SWOT akan terlihat hal-hal apa saja yang perlu dikembangkan dalam program kerakyatan selanjutnya yang akan digulirkan pemerintah.

Analisis SWOT ini juga berperan sebagai instrumen yang bermanfaat dalam aktivitas analisis strategis. Dengan analisis ini, suatu organisasi dapat meminimalisir kelemahan dan menekan dampak ancaman yang harus dihadapi.

2.3.2.2. Manfaat Analisis SWOT

Secara umum manfaat analisis SWOT yaitu sebagai berikut (sumber: artikel online www.seputarilmu.com, diakses pada tanggal 23 Februari 2020):

- Perusahaan/ Instansi atau organisasi akan menjadi lebih memahami kekuatannya dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkannya.
- Perusahaan akan dapat melihat suatu peluang dan dapat mempertahankan peluang.
- Perusahaan mengetahui suatu kelemahan serta mencari solusi untuk mengurangi kelemahan tersebut.
- Perusahaan mengetahui suatu potensi ancaman serta mencari solusi untuk menghindari ancaman tersebut.

Metode analisis SWOT bisa dianggap sebagai metode analisis yang paling dasar, yang bermanfaat untuk melihat suatu topik ataupun suatu permasalahan dari 4 (empat) sisi yang berbeda. Hasil dari analisa biasanya berupa arahan ataupun rekomendasi untuk mempertahankan kekuatan dan untuk menambah keuntungan dari segi peluang yang ada, sambil mengurangi kekurangan dan juga menghindari ancaman. Jika digunakan dengan benar, analisis ini akan membantu untuk melihat sisi-sisi yang terlupakan atau tidak terlihat selama ini. Dari pembahasan tersebut, analisis SWOT merupakan instrumen yang bermanfaat dalam melakukan analisis strategi. Analisis ini berperan sebagai alat untuk meminimalisasi kelemahan yang terdapat dalam suatu perusahaan atau organisasi serta menekan dampak ancaman yang timbul dan harus dihadapi.

2.3.3. Komponen Analisis SWOT

2.3.3.1. *Strength* (S)

Strength (kekuatan) yaitu analisis kekuatan, situasi ataupun kondisi yang merupakan kekuatan dari suatu organisasi atau perusahaan pada saat ini. Yang perlu dilakukan di dalam analisis ini adalah setiap perusahaan atau organisasi perlu menilai kekuatan-kekuatan dan kelemahan di bandingkan dengan para pesaingnya. Misalnya jika kekuatan perusahaan tersebut unggul di dalam teknologinya, maka keunggulan itu dapat di manfaatkan untuk mengisi segmen pasar yang membutuhkan tingkat teknologi dan juga kualitas yang lebih maju.

2.3.3.2. *Weaknesses* (W)

Weaknesses atau kelemahan yaitu analisis kelemahan, situasi ataupun kondisi yang merupakan kelemahan dari suatu organisasi atau perusahaan pada saat ini. Merupakan cara menganalisis kelemahan di dalam sebuah perusahaan ataupun organisasi yang menjadi kendala yang serius dalam kemajuan suatu perusahaan atau organisasi.

2.3.3.3. *Opportunity* (O)

Opportunity atau peluang yaitu analisis peluang, situasi atau kondisi yang merupakan peluang diluar suatu organisasi atau perusahaan dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan. Cara ini adalah untuk mencari peluang ataupun terobosan yang memungkinkan suatu perusahaan ataupun

organisasi bisa berkembang di masa yang akan depan atau masa yang akan datang.

2.3.3.4. *Threats* (T)

Threats atau ancaman yaitu analisis ancaman, cara menganalisis tantangan atau ancaman yang harus dihadapi oleh suatu perusahaan ataupun organisasi untuk menghadapi berbagai macam faktor lingkungan yang tidak menguntungkan pada suatu perusahaan atau organisasi yang menyebabkan kemunduran. Jika tidak segera di atasi, ancaman tersebut akan menjadi penghalang bagi suatu usaha yang bersangkutan baik di masa sekarang maupun masa yang akan datang.

Berikut adalah gambaran matriks Analisis SWOT:

	Faktor Internal	KEKUATAN (<i>STRENGHT</i>)	KELEMAHAN (<i>WEAKNESS</i>)
Faktor Eksternal			
PELUANG (<i>OPPORTUNITIES</i>)		Strategi S-O, menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	Strategi W-O Mengatasi kelemahan untuk memanfaatkan peluang
ANCAMAN (<i>THREATS</i>)		Strategi S-T, menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	Strategi W-T, mengatasi kelemahan untuk menghindari ancaman

Tabel 2.2. Matriks Analisis SWOT. (Sumber: David, F.R. 2006. *Manajemen Strategis edisi 10*, dalam Jurnal Pembangunan Berkelanjutan oleh Supriyanto, Syarifudin dan Ardi.2018.)

Analisis SWOT (*Strengths, Weakness, Opprtunities, Threats*) menjelaskan secara terperinci apa saja yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman terhadap insan lembaga, organisasi dan juga perusahaan. Sehingga nantinya akan

terlihat apa kekuatan yang perlu dipandang penting, kelemahan apa yang harus diperbaiki, peluang yang harus diraih dan ancaman apa yang ada. Sehingga dari analisa tersebut akan didapatkan beberapa solusi/ saran untuk mengatasi permasalahan yang muncul dari kelemahan dan ancaman tersebut.

2.4. Penelitian Terdahulu

Sandy Mulia Ardhan, (2018) Kebijakan Pemerintahan Presiden Joko Widodo Tentang Pemberlakuan Satu Harga BBM di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan BBM 1 Harga lahir atas ketidakadilan selama ini terhadap masyarakat daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) karena perbedaan harga jual BBM. Untuk mewujudkan program tersebut tentu saja dibutuhkan anggaran, maka dalam hal ini diserahkan kepada PT Pertamina (Persero) selaku operator penyediaan energi nasional di Indonesia. Penelitian ini belum lebih lanjut meneliti implementasi pelaksanaan di lapangan atau dimasing-masing wilayah yang menjadi target Pemerintah.

R. Ayu Anindhia Puspha Sari, (2014) Analisis Distribusi Hilir Bahan Bakar Migas dan Peranan BPH Migas Terhadap Kemandirian Energi di Indonesia. Penelitian ini menyebutkan bahwa infrastruktur Migas di Indonesia masih terkesan hanya difokuskan pada daerah dalam pulau Jawa. Masalah lain yang muncul dalam pendistribusian migas adalah penyelewengan subsidi BBM dalam penyaluran BBM kepada masyarakat. Pengendalian konsumsi BBM juga merupakan bagian dari tugas Badan Pengatur Hilir Minyak Bumi dan Gas (BPH Migas). Kenaikan konsumsi BBM dari tahun ke tahun membuat peran BPH

Migas semakin dibutuhkan. BPH Migas juga bertugas menentukan kuota BBM bersubsidi setiap daerah sesuai dengan kebutuhan.

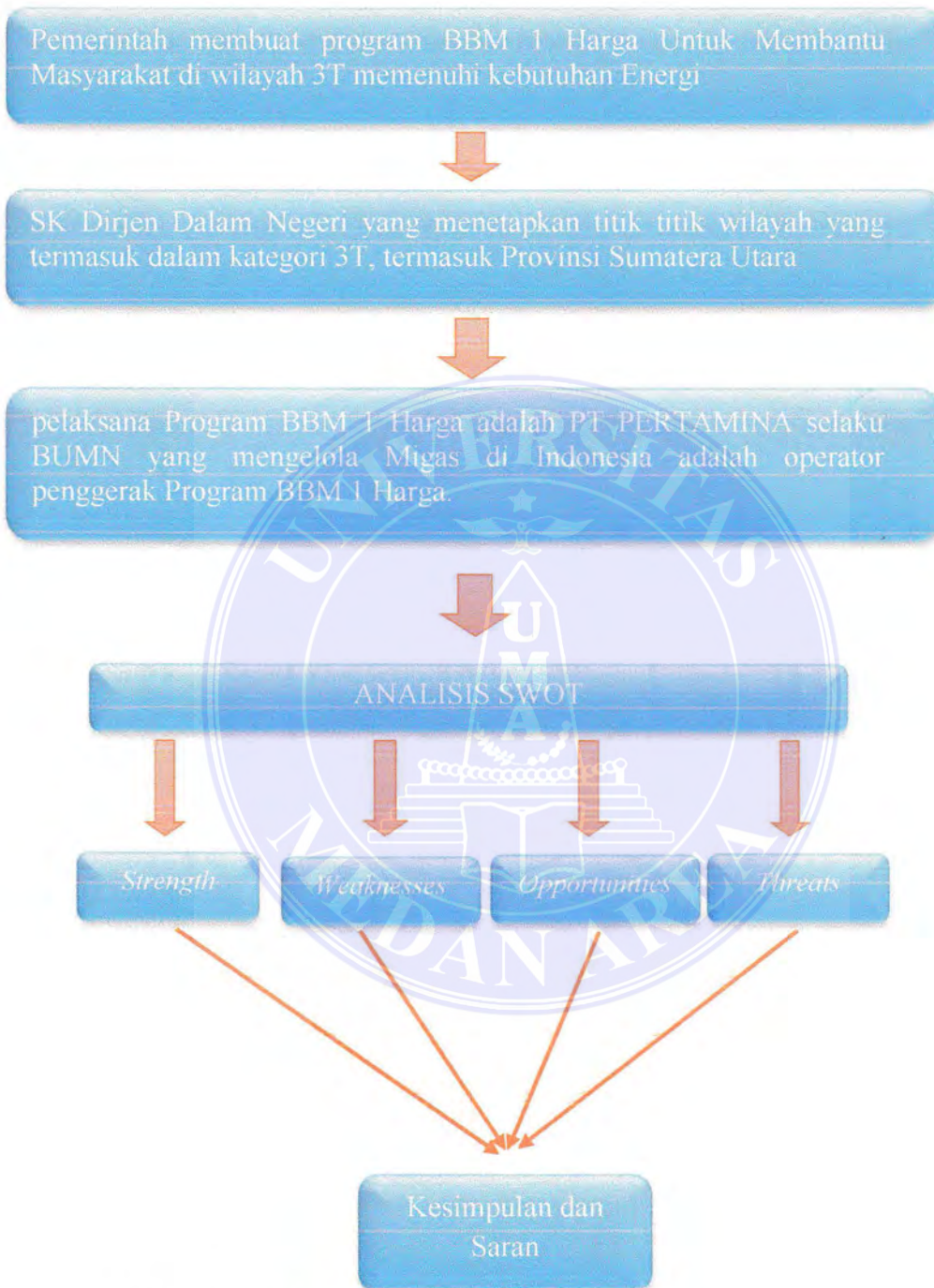
2.5 Kerangka Pemikiran

Demi mewujudkan keadilan energi di seluruh wilayah Indonesia, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo mencanangkan kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga. Kebijakan tersebut dilatar belakangi oleh mahalnya harga BBM di beberapa daerah terutama di Indonesia Bagian Timur. Daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) menjadi fokus Pemerintah dalam mengimplementasikan program BBM Satu Harga. Untuk mendukung kebijakan tersebut, Kementerian ESDM telah menetapkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 36 Tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan Secara Nasional. Permen ini mengamanatkan agar Badan Usaha penyalur BBM (Pertamina) mendirikan penyalur di Lokasi Tertentu yaitu lokasi-lokasi yang belum terdapat Penyalur Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan, sehingga masyarakat dapat membeli BBM dengan harga jual eceran yang ditetapkan Pemerintah. Target Kebijakan BBM satu harga yaitu pembangunan sekitar 148 titik lembaga penyalur hingga tahun 2019.

Dengan adanya program BBM Satu Harga ini diharapkan menjadi salah satu peluru bagi pemerintah untuk dapat mensejahterakan masyarakat yang berada di kawasan 3T. Untuk mendorong implementasinya, kementerian ESDM juga menerbitkan regulasi turunan yaitu Surat Keputusan (SK) Direktur Jendral

Migas terkait lokasi untuk pendistribusian jenis BBM tertentu dan BBM Khusus penugasan secara bertahap dari tahun 2017 hingga 2019.

Namun, tentu saja dalam pelaksanaan pendirian Lembaga Penyalur pada kawasan-kawasan 3T di Kabupaten Nias Selatan, terjadi beberapa kendala. Terutama dalam hal pembangunan infrastruktur dan moda transportasi yang digunakan untuk menyalurkan BBM tersebut. Belum lagi masalah belum terlayannya semua penduduk di wilayah tersebut dikarenakan penyebaran penduduk yang tidak merata pada kawasan 3T. Untuk mengetahui lebih lanjut perihal Program BBM 1 Harga ini perlu dilakukan analisis agar bisa menjadi pertimbangan bagi perusahaan atau pihak-pihak tertentu akan adanya kebijakan sejenis. Berikut adalah kerangka pemikiran terkait Analisis Program BBM 1 Harga PT Pertamina (Persero) khususnya untuk wilayah Kabupaten Nias Selatan.



Bagan 2.1. Kerangka Pikir (Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2019)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

Berdasarkan judul yang diangkat, penelitian ini dilaksanakan di PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region I yang beralamat di Jalan Kl. Yos Sudarso Nomor 8-10 Medan. Namun, penulis juga akan melakukan penelitian ke Kabupaten Nias Selatan untuk melakukan observasi. Penelitian diperkirakan akan berlangsung dalam jangka waktu 2 (dua) bulan yakni pada Bulan Desember 2019 sampai dengan Januari 2020.

3.2. Bentuk Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2016) dalam buku “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan *Research&Development*, dikutip dari artikel *online* www.maxmanroe.com tanggal 28 Oktober 2019. Secara umum, pengertian metode penelitian adalah suatu proses atau cara yang dipilih secara spesifik untuk menyelesaikan masalah yang diajukan dalam sebuah riset. Sedangkan metodologi penelitian adalah serangkaian langkah-langkah yang sistematis/ terstruktur yang dilakukan oleh peneliti untuk menemukan jawaban yang tepat atas pertanyaan objek penelitian. Adapun langkah-langkah sistematis tersebut adalah:

- Proses Identifikasi dan merumuskan masalah
- Penyusunan kerangka berpikir
- Pembahasan masalah
- Membuat kesimpulan dan saran

Metode Penelitian apabila dilihat dari *level of explanation* dapat dibedakan menjadi penelitian deskriptif, komparatif dan asiosiatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (*independent*) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara varibel yang satu dengan yang lain. Penelitian komparatif merupakan suatu penelitian yang bersifat membandingkan sesuatu. Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih.

Sementara menurut jenis data dan analisis dapat dibedakan menjadi penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan data kuantitatif (data yang berbentuk angka atau data yang diangkakan). Metode kuantitatif dinamakan metode tradisional, karena metode ini sudah mentradisi sebagai metode untuk penelitian.

Metode ini sebagai metode ilmiah karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit, obyektif, terukur, rasional, dan sistematis. Metode ini juga disebut metode *discovery*, karena dengan metode ini dapat ditemukan dan dikembangkan berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi baru. Metode ini disebut kuantitatif

UNIVERSITAS MEDAN AREA
Metode ini sebagai metode ilmiah karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit, obyektif, terukur, rasional, dan sistematis. Metode ini juga disebut metode *discovery*, karena dengan metode ini dapat ditemukan dan dikembangkan berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi baru. Metode ini disebut kuantitatif

Metode kuantitatif merupakan metode yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/ statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah diterapkan.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan data kualitatif (berbentuk data, kalimat, skema, dan gambar). Metode penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode baru karena popularitasnya belum lama. Metode ini disebut juga sebagai metode artistik, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpolo) dan disebut sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.

Jadi metode penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan dengan penggabungan informasi-informasi terkait objek penelitian, analisis data bersifat kualitatif yakni pengumpulan data dan informasi yang diperoleh untuk selanjutnya dikembangkan menjadi jawaban suatu penelitian, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Untuk menganalisis Program BBM Satu Harga di Kabupaten Nias Selatan ini, penulis menggunakan **metode kualitatif dengan pendekatan penelitian**

deskriptif analisis

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/8/23

35

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)21/8/23

3.3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti adalah instrument penelitian. Keberhasilan dalam pengumpulan data banyak ditentukan oleh kemampuan peneliti menghayati situasi sosial yang dijadikan fokus penelitian. Beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian analisis Program BBM 1 Harga PT Pertamina (Persero) di Kabupaten Nias Selatan ini adalah sebagai berikut:

3.3.1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung.

Jenis wawancara dalam penggunaannya ada tiga, yaitu wawancara terstruktur digunakan apabila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Dalam tehnik ini peneliti telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah dipersiapkan. Alat bantu yang dapat digunakan dalam wawancara antara lain *tape recorder*, gambar brosur dan sebagainya. Jenis yang kedua adalah wawancara semistruktur, pelaksanaan wawancara ini lebih bebas jika dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan wawancara jenis ini adalah untuk menentukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang

diwawancarai diminta pendapat dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara ini pendengar mencatat dan mendengar dengan teliti apa yang dikemukakan oleh narasumber.

Yang terakhir adalah wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data. Pedoman yang digunakan dalam wawancara jenis ini hanyalah berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Dalam wawancara tidak terstruktur, peneliti belum mengetahui secara pasti data apa yang akan diperoleh, sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang diceritakan oleh responden.

Jenis metode wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara semistruktur, dimana penulis mewawancarai beberapa informan dan mendapatkan data yang sesuai dengan masalah yang diteliti yaitu tentang Analisis Program BBM 1 Harga di Kabupaten Nias Selatan. Dalam wawancara ini penulis menghubungi beberapa informan baik melalui komunikasi jarak jauh ataupun dengan berhadapan langsung (*face to face*). Wawancara langsung penulis lakukan pada saat melakukan kunjungan ke Lembaga penyalur yang berada di kecamatan Lolowa'u. Disana penulis mewawancarai konsumen yang sedang melakukan pengisian di SPBU tersebut.

Informan Penelitian adalah subyek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami obyek (Moh. Nazir 2005:5) dalam bukunya "Metode Penelitian" yang dikutip dari wordpress.com. Dalam

Penelitian ini, peneliti menggunakan informan penelitian utama (*Key Informan*). Yang dimaksud Informan penelitian utama (*Key Informan*) adalah orang yang paling tahu banyak informasi mengenai objek yang sedang di teliti atau data yang dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumber pertama.

Penggunaan informan sebagai salah satu metode pengumpulan data biasa digunakan dalam penelitian kualitatif. Seperti dalam jurnal Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Membangun *Smart City* Di Kota Medan, Adi Suhendra dan Arwanto H.Ginting 2018, pengambilan data yang dilakukan untuk meneliti topik tersebut salah satunya adalah dengan wawancara yang dilakukan pada sejumlah informan yang berada di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Komunikasi dan Informatika, maupun pemberitaan dari media cetak dan elektronik.

Adapun yang menjadi Informan Penelitian Analisis Program BBM 1 Harga PT Pertamina (Persero) di Kabupaten Nias Selatan ini adalah sebagai berikut:

1. Administrator Retail Dealership, Mitra Kerja Integrated Terminal 1 BBM Sibolga, Nurdin.
2. Sales Branch Marketing Sibolga – PT Pertamina (Persero), Dambha Herviyanto.
3. Pemilik SPBU Program BBM 1 Harga di Kabupaten Nias Selatan - PT Pertamina (Persero), Peter.
4. Masyarakat yang melakukan pengisian BBM di SPBU Program BBM 1 Harga Kecamatan Lahusa dan Kecamatan Lolowau.

5. Manager Operasional SPBU Nias Barat.

3.3.2. Observasi

Pengertian Observasi menurut Prof. Dr. Suharsimi Arikunto dalam bukunya *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* yang penulis kutip dari artikel online gurupendidikan.co.id pada tanggal 23 Februari 2020, Observasi pengamatan langsung dari lingkungan fisik atau pengamatan langsung suatu kegiatan yang sedang berlangsung yang mencakup semua kegiatan perhatian ke objek dengan menggunakan alat penilaian sensorik.

Ratcliff, D (2001:75) dalam Pupu Saeful Rahmat (Penelitian Kualitatif, 2009) menyatakan beberapa bentuk observasi yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu observasi partisipasi, observasi tidak terstruktur dan observasi kelompok tidak terstruktur.

1. Observasi partisipasi (*participant observation*) adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan dimana observer atau peneliti benar-benar terlibat dalam keseharian responden.
2. Observasi tidak berstruktur adalah observasi yang dilakukan tanpa menggunakan *guide observasi*. Pada observasi ini peneliti atau pengamat harus mampu mengembangkan daya pengamatannya dalam mengamati suatu objek.
3. Observasi kelompok adalah observasi yang dilakukan secara berkelompok

UNIVERSITAS MEDAN AREA atau beberapa objek sekaligus.

Keunggulan teknik pengumpulan data dengan cara observasi ini adalah dapat merekam hal-hal, perilaku pertumbuhan dan sehingga pada saat kejadian berlangsung atau saat perilaku terjadi. Dalam pengumpulan data terkait penelitian ini, penulis melakukan observasi ke Kabupaten Nias Selatan tepatnya ke kota gunung sitoli, teluk dalam, Kecamatan Lahusa, Kecamatan Lolowau dan pelabuhan penyebrangan di Kecamatan Teluk Dalam. Hasil dari observasi ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai Program BBM 1 Harga di Kabupaten Nias Selatan, bagaimana kondisi nyata dilapangan untuk dijadikan saran atas pembahasan tesis ini. Alasan peneliti melakukan observasi adalah untuk menyajikan gambaran realistik kejadian, untuk menjawab pertanyaan, untuk membantu mengerti kondisi nyata yang ada di Kabupaten Nias Selatan. Adapun hal – hal yang akan menjadi objek observasi peneliti adalah sebagai berikut:

1. Melihat kondisi jalur transportasi baik di darat ataupun pelabuhan antar Pulau yang digunakan sebagai jalur transportasi BBM.
2. Melihat proses pelayanan kepada konsumen langsung yang melakukan pembelian di SPBU Program BBM 1 Harga.
3. Melihat kondisi fisik SPBU Program BBM 1 Harga, apakah terdapat peluang-peluang untuk pengembangan produk Pertamina lainnya pada SPBU tersebut.
4. Melihat dan mengamati kondisi fasilitas pendukung lainnya untuk operasional SPBU Program BBM 1 Harga seperti ketersediaan listrik dan air.

3.3.3. Studi Dokumentasi

Menurut Sugiyono dalam bukunya “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D” (2016) yang dikutip dari artikel online blogspot.com, pengertian Studi dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Terdapat dua jenis dokumen yang digunakan dalam studi dokumentasi yaitu:

1. Dokumen primer yaitu, dokumen yang ditulis langsung oleh orang yang mengalami peristiwa.
2. Dokumen sekunder yaitu, dokumen yang ditulis kembali oleh orang yang tidak langsung mengalami peristiwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari orang yang langsung mengalami peristiwa.

Menurut Bungin (2007:121) dalam Jurnal Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif (Natalina Nilamsari, 2014), “metode documenter adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian social untuk menelusuri data historis”.

Studi dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membaca literatur-literatur yang berhubungan tentang buku/ artikel program ataupun kebijakan pemerintah, buku/ artikel tentang ilmu pemerintahan serta dokumen-dokumen yang ada relevansinya dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini. Kajian dokumen ini sangat bermanfaat karena dapat dilakukan dengan tanpa mengganggu objek atau suasana penelitian. Peneliti dengan mempelajari dokumen-dokumen

tersebut dapat mengenal budaya dan nilai-nilai yang dianut oleh objek yang diteliti.

Beberapa keuntungan penggunaan studi dokumen dalam penelitian kualitatif, yang dikemukakan oleh Nasution (2003:85) dalam dalam Jurnal Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif (Natalina Nilamsari, 2014) adalah:

1. Bahan documenter itu telah ada, telah tersedia dan siap pakai.
2. Penggunaan bahan ini tidak meminta biaya, hanya memerlukan waktu untuk mempelajarinya.
3. Banyak yang dapat diambil pengetahuan dari bahan itu bila dianalisis dengan cermat dan terdapat hal – hal yang berguna bagi penelitian yang sedang dijalankan.
4. Dapat memberikan latar belakang yang lebih luas mengenai pokok penelitian.
5. Dapat dijadikan bahan triangulasi untuk mengecek kesesuaian data.
6. Merupakan bahan utama dalam penelitian historis.

Lebih lanjut Moleong (2007:217) dalam dalam Jurnal Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif (Natalina Nilamsari, 2014) memberikan alasan-alasan kenapa studi dokumen berguna bagi penelitian kualitatif, diantaranya:

1. Karena merupakan sumber yang stabil, kaya dan mendorong.
2. Berguna sebagai bukti (*evident*) untuk suatu pengujian.
3. Berguna dan sesuai karena sifatnya yang alamiah, sesuai dengan konteks, lahir dan berada dalam konteks.

4. Relatif murah dan tidak sukar ditemukan, hanya membutuhkan waktu.
5. Hasil pengajian isi akan membuka kesempatan bagi perluasan pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki.

3.3.4. *Focused Group Discussion*

Menurut Irawan (2006:1) dalam buku *Focus Group Discussion* (FGD) Sebuah Pengantar Praktis, FGD berarti suatu proses pengumpulan data dan informasi yang sistematis mengenai suatu permasalahan tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok. Hal ini berbeda dengan wawancara, dalam diskusi fasilitator tidak selalu bertanya. Tugasnya justru bukan untuk bertanya, tetapi mengemukakan suatu persoalan, suatu kasus, suatu kejadian sebagai bahan diskusi itu sendiri.

Diskusi kelompok terarah atau Fokus Grup Diskusi memiliki tujuan yakni untuk memperoleh masukan atau informasi mengenai permasalahan yang sifatnya lokal dan spesifik. Namun penyelesaian tentang masalahnya ditentukan pihak lain setelah masukan diterima dan dianalisa.

Sebagai sebuah metode penelitian, maka FGD adalah sebuah upaya yang sistematis dalam pengumpulan data dan informasi. Sebagaimana makna dari *Focused Group Discussion*, maka terdapat 3 kata kunci, yaitu:

Diskusi – bukan wawancara atau obrolan

- Kelompok – bukan individual
- Terfokus – bukan bebas

Jurnal Implementasi Kebijakan Program Penanganan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Kota Gorontalo. (Anita Asna.2010), hasil penelitian salah satunya menjelaskan bahwa Keberterimaan masyarakat terhadap kebijakan P2KP ditumbuhkan dalam realitas kemasyarakatan agar warga masyarakat akan lebih mengetahui, memahami dan melibatkan diri secara langsung dalam setiap kebijakan pemerintah kota, tidak terkecuali terhadap keberlanjutan implementasi kebijakan P2KP dikota Gorontalo. Dari hasil penelitian ini informasi bahwa keberterimaan masyarakat bisa didapatkan melalui Fokus Group Diskusi yang dilaksanakan oleh Penulis jurnal tersebut.

Carey (1994) yang dikutip dari Yati Afiyanti (2008) dalam jurnal bertajuk *Focus Group Discussion* (Diskusi Kelompok Terfokus) Sebagai Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif, menjelaskan bahwa informasi atau data yang diperoleh melalui FGD lebih kaya atau lebih informatif disbanding dengan data yang diperoleh dengan metode-metode pengumpulan data lainnya. Hal ini dimungkinkan karena partisipasi individu dalam memberikan data dapat meningkat jika mereka berada dalam suatu kelompok diskusi.

Pemilihan FGD sebagai metode pengumpulan informasi pada penelitian Program

BBM 1 Harga ini dikarenakan:

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/8/23

44

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)21/8/23

1. Objek penelitian ini bersifat spesifik yakni tentang analisa Program BBM 1 Harga dimana dalam hal ini peneliti khusus menganalisis program 1 harga PT Pertamina di Kabupaten Nias Selatan. Adapun yang akan menjadi peserta dalam FGD ini adalah: para pengusaha SPBU BBM 1 Harga di Kabupaten Nias Selatan dan *sales team* Pertamina Sibolga, yang diperkirakan jumlahnya sekitar 6 orang.
2. Forum diskusi ini diharapkan dapat menghasilkan informasi-informasi untuk menjawab permasalahan dalam penelitian Program BBM 1 Harga di Kabupaten Nias Selatan.
3. Untuk memperjelas kondisi nyata dilapangan mengenai operasional SPBU Program BBM 1 Harga melalui informasi yang didapatkan langsung dan tidak terputus yang artinya dibahas tuntas Bersama dengan pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan Program BBM 1 Harga di Kabupaten Nias Selatan.

Hasil dari FGD ini nantinya akan dimasukkan dalam Analisis SWOT untuk mendapatkan jawaban dari rumusan permasalahan penelitian.

3.4. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Data yang telah terkumpul dianalisa secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menjelaskan hasil - hasil penelitian dalam bentuk kata- kata lisan maupun tertulis dari sejumlah data kualitatif yang diperoleh dari hasil wawancara, *Focus Group Discussion* (FGD), studi dokumentasi dan observasi untuk memperjelas gambaran penelitian yang dilakukan.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas ada beberapa hal yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kekuatan dari Program BBM 1 Harga ini adalah Program program perdana yang langsung menyentuh masyarakat di wilayah 3T, karena program ini diperuntukkan untuk masyarakat 3T yang mana sebelum adanya Program BBM 1 Harga ini masyarakat di Kab. Nias Selatan memperoleh BBM dengan harga yang bervariasi. Selain itu program BBM 1 Harga ini tidak akan menjadi beban bagi APBN karena akan dilaksanakan oleh BUMN PT Pertamina.
2. Namun, dibalik itu masih terdapat beberapa kelemahan dalam Program BBM 1 Harga ini diantaranya Program ini belum didukung oleh sarana dan fasilitas pendukung lainnya, seperti jalur transportasi yang memadai bagi jalannya mobil tanki pengangkut BBM dan ketersediaan jaringan listrik yang kondusif. Salah satu masalah yang ditemukan pada SPBU Program BBM 1 Harga di Kecamatan Lolowa'u adalah 70% operasional SPBU tersebut menggunakan genset yang menyebabkan pembengkakan biaya operasional. Lain hal nya dengan SPBU Nias Barat Sejahtera yang harus ikut juga memperbaiki jalan yang menjadi jalur utama bagi Mobil tanki.

3. Peluang dari adanya program BBM 1 Harga ini adalah Pertamina bisa membuka kios-kios LPG atau Pelumas pada SPBU tersebut. Ditambah lagi dengan adanya peralihan dari Minyak Tanah PSO ke LPG 3Kg, tentunya agen resmi Gas Pertamina juga bisa membuka pangkalan-pangkalan gas mereka.
4. Dalam Pelaksanaan Program ini tentu juga memiliki beberapa hal yang perlu diantisipasi agar keberlangsungan program dan kebutuhan masyarakat diwilayah 3T akan BBM tetap terjaga. Terutama yang menjadi tantangan dalam Program ini seperti kurangnya pengawasan dan masih banyaknya pengecer dikarenakan luas wilayah yang belum terjangkau sepenuhnya oleh SPBU Program BBM 1 Harga.

5.2. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan penulis berdasarkan uraian di atas adalah:

1. Pemerataan pembangunan di wilayah terjauh, tertinggal dan terdepan bukan hanya permasalahan dalam memperoleh BBM. Tetapi juga perihal ketersediaan sarana dan fasilitas yang memadai, seperti sekolah dengan tenaga pengajar yang profesional, ketersediaan Listrik dan Air bersih, Perpustakaan Daerah, jalur transportasi berikut dengan transportasi umum yang memadai dan juga pasar rakyat yang bersih dan nyaman. Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan diharapkan mampu memenuhi kebutuhan tersebut untuk menunjang kehidupan sosial dan perekonomian penduduk di Kabupaten Nias Selatan.

2. Beberapa kecamatan yang belum terlayani oleh SPBU Program BBM 1 Harga yang ada saat ini masih mendapatkan BBM melalui para pengecer dengan harga bervariasi. Penetapan Harga Eceran Tertinggi perlu diberlakukan oleh Pemda setempat agar penduduk tetap bisa merasakan dampak adanya Program BBM 1 Harga, sembari menunggu adanya pengembangan program ini hingga ke beberapa titik krusial yang belum ada lembaga penyalur BBM 1 Harga.
3. Penurunan harga BBM tidak akan disubsidi dari APBN sehingga tidak akan mempengaruhi tingginya belanja pemerintah, melainkan murni dibebankan pada manajemen keuangan PT. Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara dengan kekayaan negara yang dipisahkan. Sehingga biaya yang timbul akan ditanggung oleh PT. Pertamina sepenuhnya. Salah satu alternatif solusi yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan subsidi silang dari keuntungan proses bisnis PT. Pertamina di wilayah lain. Keuntungan itu dapat dialihkan untuk menutupi biaya yang timbul akibat penurunan harga. Selain itu Pertamina juga bisa meningkatkan pengendalian efisiensi biaya produksi untuk menjaga tingkat profitabilitas Perusahaan.
4. Dengan adanya penambahan SPBU di beberapa titik baru tersebut, Pertamina juga bisa melakukan ekspansi produk-produk lain seperti Gas LPG atau produk Pelumas pada SPBU atau yang lazim disebut dengan usaha *Non Fuel Retail* (NFR).

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainul. M. 2013. *Konstitusionalitas Kebijakan Belanja Subsidi Bahan Bakar Minyak Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*. (Jurnal). Jakarta:Kementrian Keuangan.
- Afiyanti, Yati. 2008. *Focus Group Discussion (Diskusi Kelompok Terfokus) Sebagai Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif* (Jurnal). Jakarta.
- Anonymous. 2019. *Pengertian Observasi* (Online), www.romadecade.org, diakses pada tanggal 7 Desember 2019.
- Anonymous.2018.*Pengertian, komponen, manfaat dan contoh analisis SWOT*. www.pelajaran.co.id (Online), diakses pada tanggal 10 Februari 2020.
- Anonymous. 2018. *Teori Lengkap Tentang Analisis SWOT* (online) <https://idtesis.com>. diakses pada tanggal 10 Desember 2019.
- Anonymous. 2019. *Pengertian Metode Penelitian* (Online), www.maxmanroe.com/. Diakses pada tanggal 05 Desember 2019.
- Anonymous. 2019. *Pengertian Studi Dokumentasi* (Online). <http://seputarpengertian.blogspot.com/2017/09/pengertian-studi-dokumentasi-serta-kekurangan-kelebihan.html>. Diakses tanggal 21 Januari 2020.
- Anonymous. 2019. *Informasi Publik terkait wilayah kerja Pertamina* (online). <https://pertamina.com/id/alamat-pusat-informasi-publik-pertamina>. Diakses pada tanggal 20 Januari 2020.
- Anonymous. 2019. *Pengertian Analisis SWOT* (Online). <https://seputarilmu.com/2019/01/analisis-swot.html>. Diakses pada tanggal 20 Februari 2020.
- Anonymous. 2013. *Pengertian Wawancara* (Online). <https://www.konsistensi.com/2013/04/wawancara-sebagai-metode-pengumpulan.html>. Diakses pada tanggal 10 Februari 2020.
- Anonymous. 2019. *Metode Pengumpulan Data* (Online). <https://lintar.net/metode-pengumpulan-data/>. Diakses pada tanggal 23 Februari 2020.

Anonymous. 2019. *BBM 1 Harga Tidak Membebani APBN* (Online). <https://money.kompas.com/read/2019/04/02/150000326/jonan--bbm-satu-harga-tidak-bebani-apbn>. Diakses 31 Maret 2020.

Direktorat Jendral Pengembangan Destinasi Pariwisata Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. (Online). <https://www.slideshare.net/fitriwardhono/profil-wilayah-kabupaten-nias-selatan>. Diakses pada tanggal 20 Januari 2020.

Fahmi, Rah Adi, Sugeng Setyadi dan Umayatu Suiroh. 2018. *Analisis Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Banten* (Jurnal). Banten: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Fuadi, Kamal. 2012. *Kebijakan dan Analisis Kebijakan* (Online). <https://fuadinotkamal.wordpress.com/>, Diakses pada tanggal 30 Oktober 2019.

Hapsari, Stephanie Dian, Bobby W.Saputra dan Bambang Rismadi. 2013. *Evaluasi Efektivitas Pengendalian Biaya Produksi dan Efisiensi Biaya Produksi* (Jurnal). Bandung: Harapan Bangsa Business School.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. 2017. Keputusan Dirjen Migas nomor 09.K/10/DJM.0/2017 Tentang Lokasi Tertentu Untuk Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan. Jakarta.

Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Siara Pers Nomor 0068.Pers/04/SJI/2018, tanggal 06 Desember 2018. Energi Berkeadilan, Menteri ESDM Implementasi BBM 1 Harga, Koversi Minyak Tanah ke LPG dan Lampu Surya Gratis di Nias.

Nathanael, Darren.2016. *Makna Tradisi Lompat Batu Nias*. (Online). www.kompasiana.com. Diakses tanggal 06 Juli 2020.

Nazarrudin. 2019. *Kebijakan Publik* (Online), <http://repository.unimal.ac.id>. diakses pada tanggal 8 Desember 2019.

Nggini, Yulius Habita. 2019. *Analisis SWOT Terhadap Kebijakan Pengembangan Pariwisata Provinsi Bali* (Jurnal). Bali: Universitas Pendidikan Nasional.

Nilamsari, Natalina. 2014. *Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif* (Jurnak Administrasi Publik). Jakarta:Universitas Prof. Dr. Moestopo.

- Prisgunanto. 2013. *Key Informan, Narasumber dan Responden*. (Online). www.prisgunanto.files.wordpress.com >. Diakses pada tanggal 20 Desember 2019.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191. 2014. *Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak*. Lembaran Kenegaraan. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2001. *Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi*. Lembaran Kenegaraan. Jakarta.
- Pertiwi, Mutiara. 2015. *Pengertian, Maksud serta tujuan berdirinya BUMN* (Online). www.kompasiana.com/. Diakses pada tanggal 01 November 2019.
- Parta, Ibeng. 2019. *Pengertian, Tingkatan, Macam, Menurut Para Ahli*. (Online). www.pendidikan.co.id. Diakses pada tanggal 02 November 2019.
- Ramadhan, Andrian dan Rizky Aprilian Wijaya. 2016. *Analisis Kebijakan Dampak Penyesuaian Harga BBM Bersubsidi Untuk Nelayan*, (Jurnal). Jakarta: Balitbang.
- Setiawan, Samhis. 2020. *Pengertian Adat Istiadat dan Contohnya*, (Online). www.gurupendidikan.co.id/adat-istiadat. Diakses 6 Juli 2020.
- Siswanto, 2017. *Analisis Risiko Penyaluran, Pelaporan dan Penetapan Harga Jual Eceran BBM Minyak Solar Bersubsidi*. (Jurnal). Tangerang: Poltek Keuangan Negara STAN.
- Stevan, 2016. *Datangnya Misionaris Jerman 1865 Warga Nias Lepas dari Kegelapan Kemiskinan dan Perbudakan*, (Online). www.hetanews.com. Diakses 6 Juli 2020.
- Sufa, Guslina. 2013. *Daerah Tertinggal Di Indonesia Timur Paling Banyak* (Online). <https://nasional.tempo.co.id>. Diakses 25 Februari 2020.
- Supriyanto, Syarifudin dan Ardi. 2018. *Analisis Kebijakan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Jambi* (Jurnal). Jambi: Universitas Jambi.
- Syaleh, Hariman. 2018. *Analisis Pengaruh Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Modal Kerja Perusahaan Terhadap Peningkatan Profitabilitas*

Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) (Jurnal). Bukittinggi: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Haji Agus Salim Bukittinggi.

Wicaksono, Pebrianto Eko. 2017. *BBM 1 Harga Bikin Biaya Operasional Pertamina Melonjak* (Online). <https://www.liputan6.com>. Diakses pada 30 Juni 2020.

Widayanti, Tri dan Sih Damayanti. 2015. *Analisis SWOT: Strategi Pengembangan Kelompok Penelitian* (Jurnal). Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Tangerang.

Widodo, Joko. 2018. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: MNC Publishing.

Widianto, Tri dan Sih Damayanto, 2015. *Analisis SWOT, Strategi Pengembangan Kelompok Penelitian* (Jurnal). Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

